



LAPORAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 121.989.138.315,-, yang didistribusikan pada 6 (enam) program guna mencapai sasaran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada 2022.

Penyusunan LKj ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKj menggambarkan secara ringkas kinerja pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2022.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

Palu, Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah



Malya Malania Noor
Ir. MAYA MALANIA NOOR, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19640313 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.3 Isu – Isu Strategis	11
1.4 Dukungan SDM, dan Sarana Prasarana	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	23
2.4 Indikator Kinerja Utama	28
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	31
3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	14
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.4	Keadaan Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	16
Tabel 1.5	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021	18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	20
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	22
Tabel 2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.....	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022	29
Tabel 2.6	Pagu Belanja (Dirinci Per Program) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	34
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah .	35
Tabel 3.5	Realisasi Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.....	45

Tabel 3.6	Realisasi Program dan Kegiatan Sub Sektor Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022	46
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.....	49
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja Sub Sektor Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	3
Gambar 1.2	Cascading Kinerja Sub Sektor Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	5
Gambar 1.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Bidang Pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2022. Komitmen pencapaian sasaran kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani Gubernur bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yakni sebesar 95,38% secara rata - rata, dimana hasil pengukuran kinerja peningkatan kesejahteraan pekebun dan peternak, dengan capaian kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADHB) yaitu 92,54%, capaian kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB) yaitu 76,83%, capaian NTP Sub Sektor Perkebunan yaitu 101,87%, dan capaian NTP Sub Sektor Peternakan yaitu 101,54. Hasil pengukuran kinerja peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan dengan capaian secara rata – rata yaitu 95,51%, hasil pengukuran kinerja untuk peningkatan populasi ternak yaitu 97,71%, dan hasil pengukuran kinerja peningkatan pemberdayaan kelompok pekebun dan peternak dengan capaian cakupan bina kelompok tani perkebun sebesar 101,37% dan cakupan bina kelompok peternakan sebesar 95,01%.

Realisasi kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD-P, dari total alokasi dana sebesar Rp 121.989.138.315,- terealisasi sebesar Rp 115.383.416.467,- (94,58%).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah organisasi perangkat daerah di bidang pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016, tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Dinas Daerah Tipe A dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019 bahwa dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

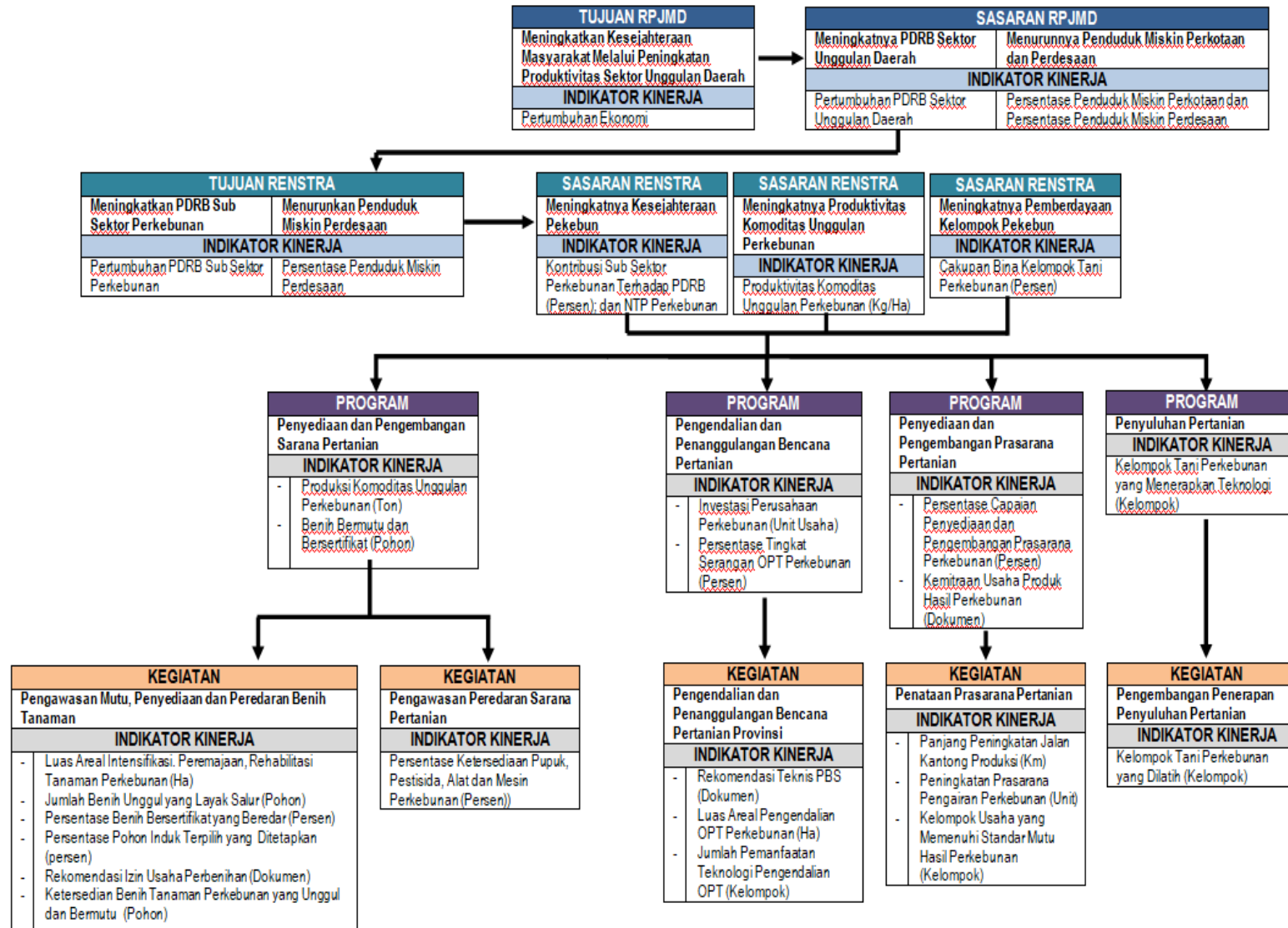
- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;

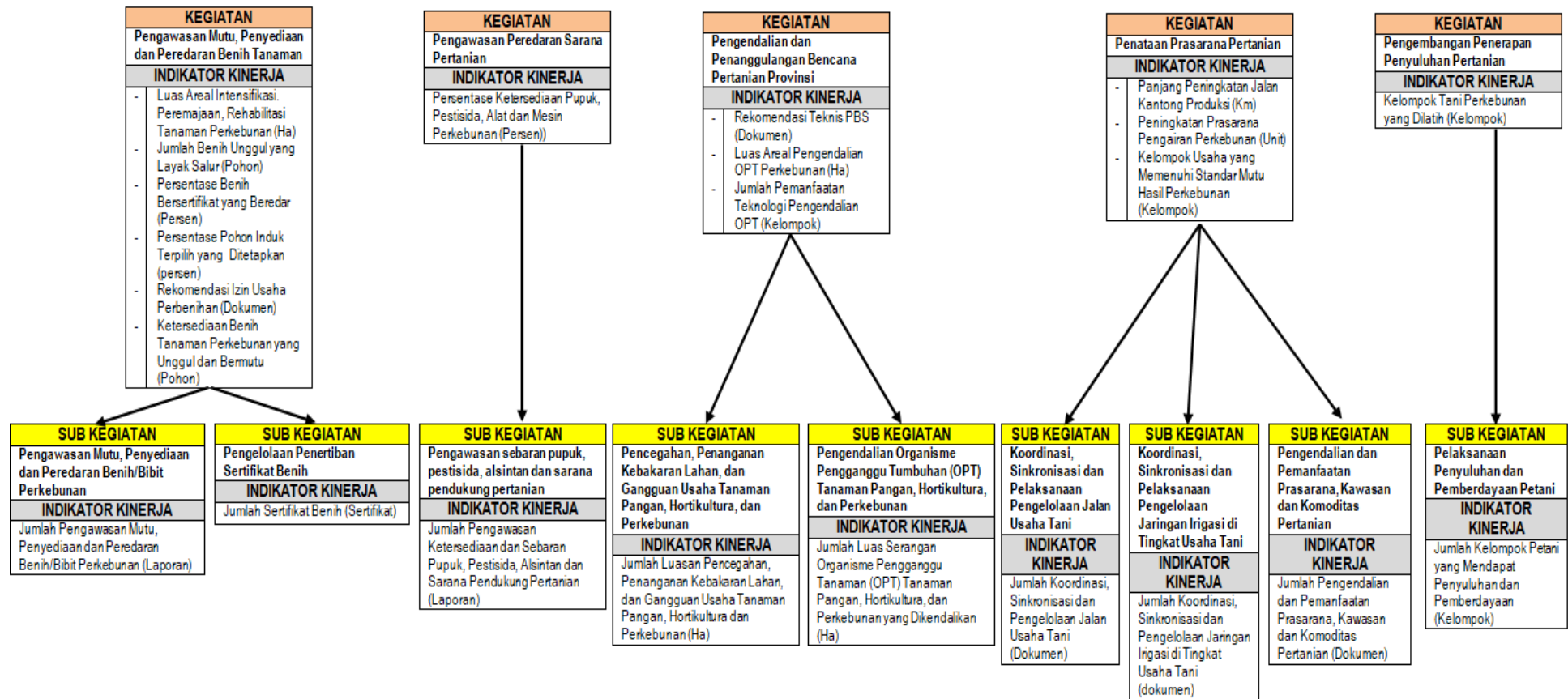
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab/kewenangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana setiap OPD berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja OPD dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Dimana OPD yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Oleh karena itu, dalam rangka mengukur kinerja Instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 ini.

Untuk memudahkan dalam proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis secara vertikal dari level unit lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah, maka disusun cascading (penjabaran) kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

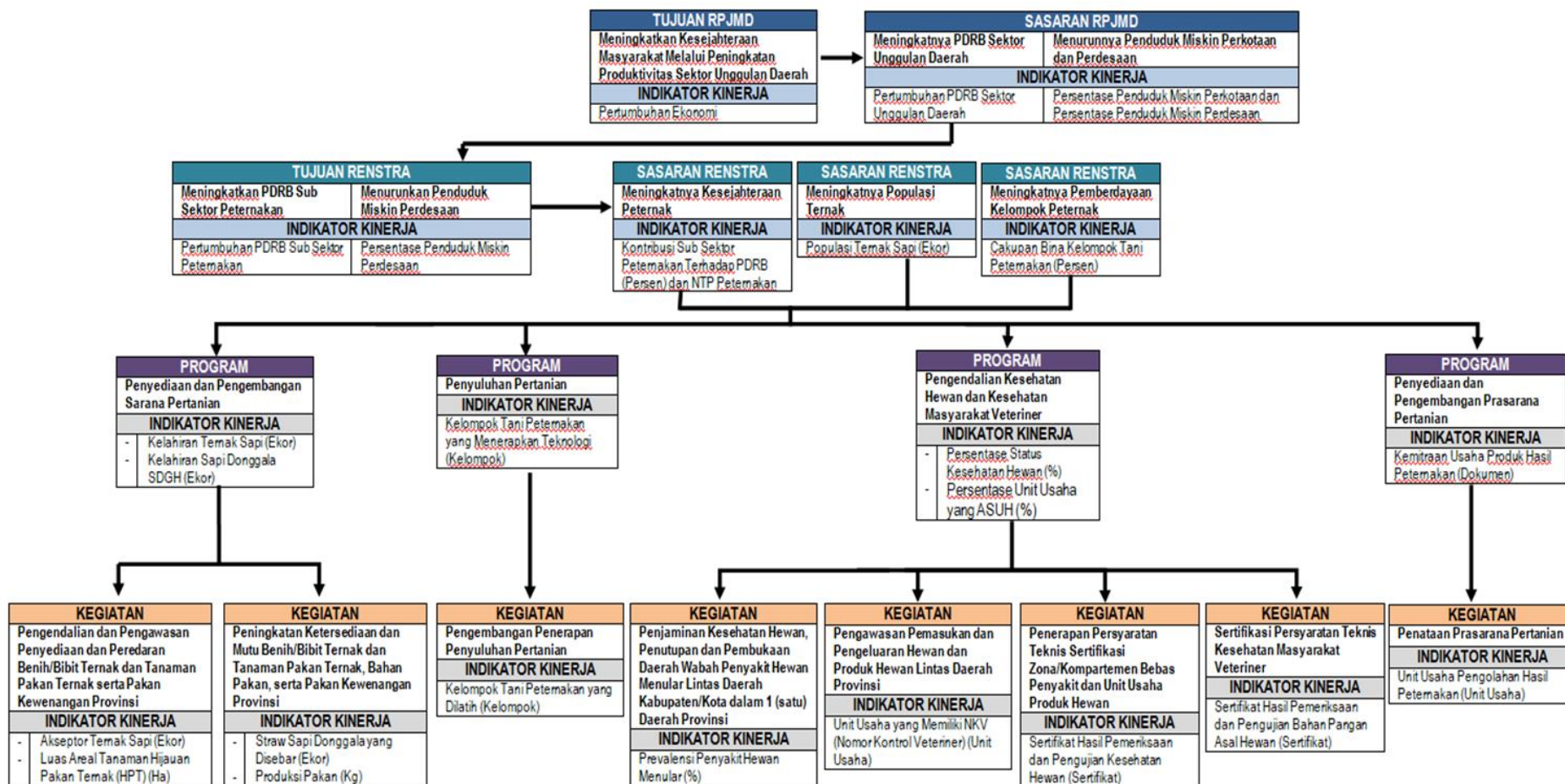
**Gambar 1.1 Cascading Kinerja Sub Sektor Perkebunan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah**

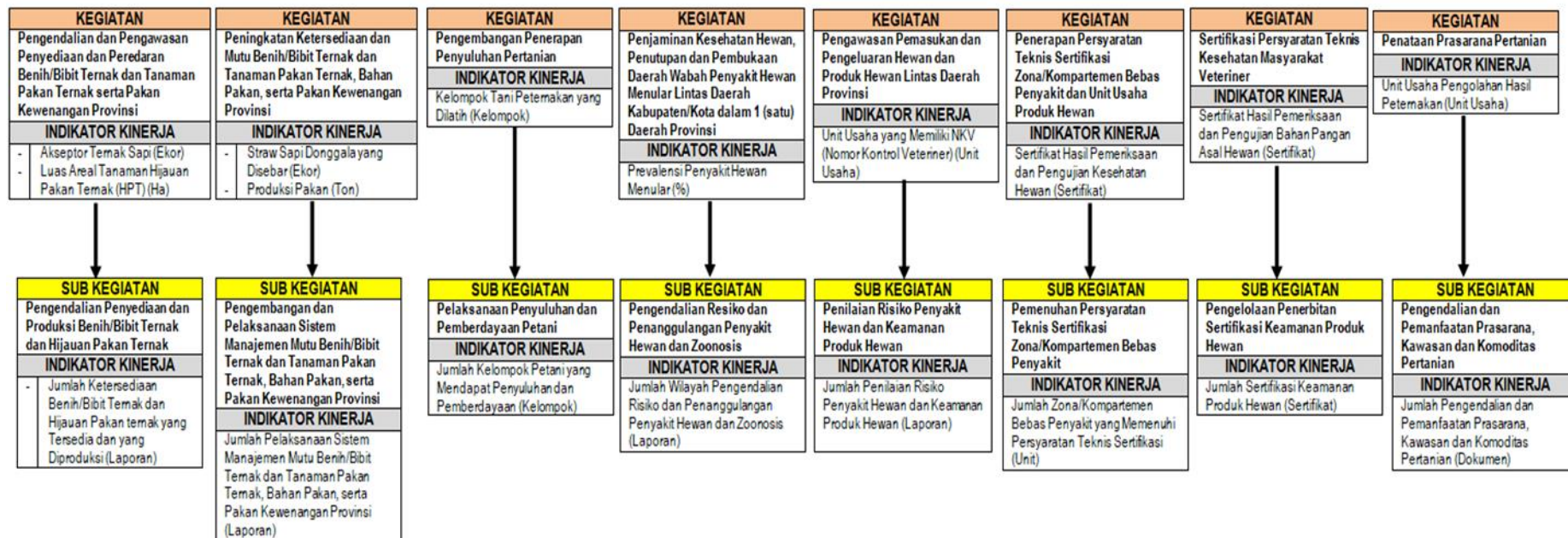




(Lanjutan Gambar 1.1 Cascading Kinerja Sub Sektor Perkebunan)

**Gambar 1.2 Cascading Kinerja Sub Sektor Peternakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah**





(Lanjutan Gambar 1.2 Cascading Kinerja Sub Sektor Peternakan)

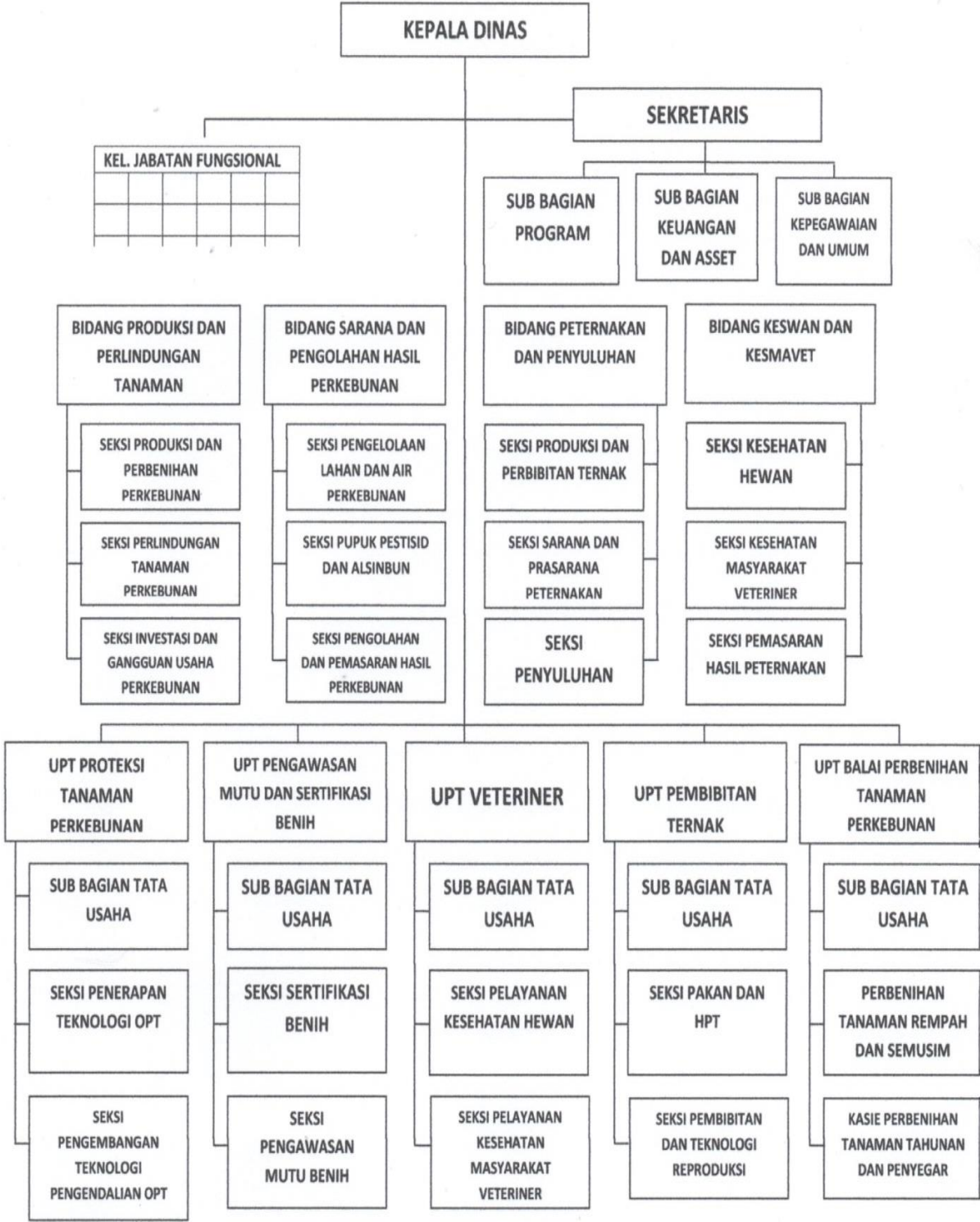
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi , dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris; membawahi
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; membawahi
 - a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - c. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Perkebunan
4. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; membawahi
 - a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - c. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; membawahi
 - a. Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Bidang Peternakan dan Penyuluhan; membawahi

- a. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
 - c. Seksi Penyuluhan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Perkebunan; membawahi;
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penerapan Teknologi Perkebunan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; membawahi
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Sertifikasi Benih
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak; membawahi
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pakan dan Hijau Pakan Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Veteriner; membawahi
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan; membawahi
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disajikan dalam Gambar 1.3 berikut :



Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana, produksi, perlindungan, penyuluhan, pasca panen, promosi dan pemasaran hasil serta bina usaha.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal dan analisis eksternal permasalahan pembangunan, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan perkebunan, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan
2. Penggunaan bibit/benih yang berkualitas dan bersertifikat
3. Pengendalian hama/penyakit OPT secara terpadu dan berkelanjutan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan
5. Optimalisasi SDM petugas lapangan dan pemanfaatan teknologi perkebunan guna menghasilkan benih berkualitas dalam upaya peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan.
6. Pembinaan intensif kelompok petani guna optimalisasi pemanfaatan bantuan perkebunan
7. Peningkatan akses petani terhadap permodalan
8. Peningkatan jaringan kemitraan usaha produk perkebunan

Sedangkan fokus pembangunan sub sektor peternakan saat ini adalah peningkatan ketahanan pangan melalui pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat menuju kemandirian pangan. Secara umum peternak di Sulawesi Tengah adalah peternakan rakyat berskala kecil yang biasanya merupakan usaha sampingan. Pertambahan penduduk yang begitu cepat harus disertai dengan

pertumbuhan produksi peternakan dalam upaya ketersediaan pangan hewani untuk konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penentuan isu strategis hasil dari identifikasi permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan bibit ternak yang berkualitas melalui penggunaan teknologi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB) dan manajemen reproduksi Kawin Alam (KA)
2. Pengawasan dan pencegahan intensif terhadap pemotongan dan pengeluaran sapi betina produktif
3. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan sesuai kebutuhan
4. Pengendalian dan pencegahan kasus penyakit hewan menular strategis dan *zoonosis* termasuk eradikasi *schistosomiasis*
5. Pembinaan intensif dan pendampingan kelompok peternak guna optimalisasi pemanfaatan bantuan peternakan
6. Peningkatan akses peternak terhadap kemudahan dalam perolehan permodalan
7. Peningkatan jaringan kemitraan usaha produk peternakan
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan
9. Penjaminan produk usaha peternakan yang ASUH

1.4. Dukungan SDM, dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana

pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Kinerja program dan kegiatan dapat dicapai dengan baik apabila setiap pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sumber daya yang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun berkenaan. Berikut komposisi pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin, pangkat/golongan ruang, dan pendidikan pada tahun 2022.

a. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat	10	13	23	
2	Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan	8	6	14	
3	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	9	10	19	
4	Bidang Peternakan dan Penyuluhan	23	12	35	
5	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	10	18	
6	UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	6	5	11	
7	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	5	6	11	
8	UPT Veteriner	3	8	11	
9	UPT Pembibitan Ternak	17	3	20	
10	UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	7	3	10	
11	Lapangan	30	1	31	
12	PPPK	2	3	5	
	Jumlah	128	80	208	

(Sumber: Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2022)

Secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 208 orang dengan perbandingan ASN pria sebanyak 128 orang (61,54%) dan ASN wanita sebanyak 80 orang (38,46%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ASN pada Dinas Perkebunan

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh pria karena merupakan dinas teknis yang membutuhkan banyak pegawai yang ditempatkan di lapangan, dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan golongan ruang, jumlah ASN pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh pegawai dengan golongan ruang III, yaitu sebanyak 123 orang atau 59,13% dari total keseluruhan ASN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No.	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat		5	11	7	23	
2	Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan		1	8	5	14	
3	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan		6	10	3	19	
4	Bidang Peternakan dan Penyuluhan		2	20	12	34	
5	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		3	11	5	19	
6	UPT Proteksi Tanaman Perkebunan		4	3	4	11	
7	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan		1	6	4	11	
8	UPT Veteriner			8	3	11	
9	UPT Pembibitan Ternak		2	14	4	20	
10	UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan		1	5	4	10	
11	Lapangan		8	22	1	31	
12	PPPK			5		5	
	Jumlah	0	33	123	52	208	

(Sumber: Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2022)

c. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menurut tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai lulusan S1 sebanyak 95 orang (45,67%), kemudian lulusan SMU/SMK menempati peringkat ke dua dengan jumlah 58 orang (27,88%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	SD	SMP	SMU/SMK	D3	S1	S2	S3	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat			6		8	9		23	
2	Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan			3		4	7		14	
3	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan			8		8	2	1	19	
4	Bidang Peternakan dan Penyuluhan			3		22	10		35	
5	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3		12	3		18	
6	UPT Proteksi Tanaman Perkebunan			3		2	6		11	
7	UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan			2		3	6		11	
8	UPT Veteriner					7	4		11	
9	UPT Pembibitan Ternak			4		12	4		20	
10	UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan			2		6	2		10	
11	Lapangan	1		24		6			31	
12	PPPK					5			5	
	Jumlah	1	0	58	0	95	53	1	208	

(Sumber: Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum tahun 2022)

1.4.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan suatu program dan kegiatan. Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal atau fasilitas pendukung yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tujuan dari program dan kegiatan tersebut dapat tercapai. Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat dilihat dari keadaan inventaris aset dan perlengkapan yang dimiliki. Berikut keadaan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 :

Tabel 1.4
Keadaan Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	TANAH	29	PERSIL
2	PERALATAN DAN MESIN	8701	
	- ALAT BESAR	31	UNIT
	- ALAT ANGKUTAN	307	UNIT
	- ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	196	BUAH
	- ALAT PERTANIAN	1945	BUAH
	- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3647	BUAH
	- ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	252	UNIT
	- ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	20	BUAH
	- ALAT LABORATORIUM	1713	BUAH
	- ALAT PERSENJATAAN	35	BUAH
	- KOMPUTER	553	UNIT
	- ALAT KESELAMATAN KERJA	2	BUAH
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	187	UNIT
	- BANGUNAN GEDUNG	183	UNIT
	- TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	UNIT
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	103	UNIT
	- JALAN DAN JEMBATAN	24	UNIT
	- BANGUNAN AIR	21	UNIT
	- INSTALASI	27	UNIT
	- JARINGAN	31	UNIT
5	ASET TETAP LAINNYA	38	
	- BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	BUAH
	- HEWAN	29	EKOR
	- TANAMAN	7	POHON

(Sumber: Buku Inventaris SIMDA Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2022)

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan - RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi/OPD provinsi secara manajerial kepada Gubernur, termasuk di dalamnya yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 terhadap 5 (lima) komponen akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan nilai total capaian sebesar sebesar 82,35. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 masuk dalam kategori Memuaskan (80 - 90) yaitu memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada hampir seluruhnya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Rekomendasi Inspektorat Daerah pada Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dengan Nomor : 700/044/E-SAKIP/PROV/VI/2022 Tanggal 1 Juli 2022, telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai upaya tindak lanjut. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. Capaian target kinerja yang diperjanjikan agar dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (<i>reward</i>) serta dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja	Menggunakan capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai dasar pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>
2. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	
3. Mengoptimalkan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Melengkapi format rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran kinerja per Triwulan tahun 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dengan kolom Hambatan dan Tindak Lanjut untuk dapat melakukan review capaian kinerja secara berkala
4. Meningkatkan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	
5. Lebih mengoptimalkan tindak lanjut hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata	
6. Hal yang perlu diperhatikan, agar meninjau kembali tujuan, sasaran dan indikator kinerja mengenai peningkatan kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan melalui peningkatan NTP dan PDRB	
	Hal tersebut telah dikonsultasikan dengan tim penyusunan RPJMD Prov. Sulteng Tahun 2021-2026, namun berdasarkan arahan Tim Penyusun RPJMD bahwa NTP dan PDRB harus tetap dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Disbunak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Melaksanakan program prioritas ke empat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu *“Mendorong Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya”* serta penyelesaian Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan
2. Menurunkan Penduduk Miskin Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan
3. Meningkatnya Populasi Ternak
4. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak

Secara lebih detail Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 berdasarkan perubahan RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan		Pertumbuhan PDRB					
			- Sub Sektor Perkebunan	5,80	6,80	7,70	7,80	8,30
			- Sub Sektor Peternakan	5,80	7,50	8,00	8,50	8,70
2	Menurunkan Penduduk Miskin Perdesaan		Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	12,54	11,43	10,32	9,21	8,10
		1 Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)					
			- Sub Sektor Perkebunan	8,86	8,87	8,88	8,90	8,91
			- Sub Sektor Peternakan	1,90	1,91	1,92	1,93	1,94
			Nilai Tukar Petani (NTP)					
			- Sub Sektor Perkebunan	101,41	101,66	101,91	102,16	102,41
- Sub Sektor Peternakan	99,00	99,75	100,50	101,25	102,00			
		2 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)					
			- Kelapa Dalam	1.211	1.234	1.258	1.282	1.307
			- Cengkeh	450	495	545	599	659
			- Kopi	607	609	611	614	616
			- Kakao	745	800	860	925	1.000
			- Pala	255	255	255	255	255
- Kelapa Sawit	2.858	2.860	2.860	2.861	2.863			
		3 Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796	506.299	546.803	590.547	637.791
		4 Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)					
			- Perkebunan	59,00	64,69	70,76	77,18	83,95
			- Peternakan	40,51	46,38	52,86	59,92	67,55

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah semuanya mengarah pada Peningkatan Kesejahteraan Pekebun dan

Peternak, Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, Populasi Ternak dan Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 - 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan</p> <p>2. Menurunkan Penduduk Miskin Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan</p>	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Meningkatkan Pendapatan Petani pekebun dan Peternak melalui Peningkatan Produksi dan Nilai tambah	Peningkatan pendapatan melalui Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani	Penguatan Kelembagaan melalui Pembinaan, Pendampingan dan Pelatihan Kelompok Tani
		Meningkatkan Pemberdayaan Tenaga Teknis, Penyuluh, dan Tenaga Kontrak Pendamping	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Teknis, Penyuluh dan Tenaga Kontrak Pendamping melalui pelatihan, TOT dan Demplot/Demarea, SLPHT dan penerapan teknologi
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Meningkatkan Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi, Peremajaan, Pengembangan Areal, Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Perkebunan
		Memfasilitasi Kemitraan dan Keterpaduan antar Sektor pada Kawasan Komoditas Unggulan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Melalui Penerapan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Serangan OPT Utama Tanaman Perkebunan Sesuai Prinsip Pengendalian Hama Terpadu	Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan Secara Terpadu dan Berkelanjutan
		Menyediakan dan Menyalurkan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Sesuai Kebutuhan
		Melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA) secara intensif	Peningkatan inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam (INKA)
	Meningkatnya Populasi Ternak	Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara optimal dan berkelanjutan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan
		Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan izin usaha, mutu produk hasil ternak dan olahannya serta hasil ikutannya di cek point	Penerapan keamanan pangan dan jaminan mutu produk olahan hasil peternakan yang ASUH

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan pagu APBD sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 - 2026 dan RKPD-Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
TOTAL ANGGARAN			110.711.374.407	121.989.138.315	11.277.763.908
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH			99.885.158.461	110.320.402.455	10.435.243.994
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak				
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan				
3	Meningkatnya Populasi Ternak				
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak				
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	29.506.734.770	38.486.253.935	8.979.519.165
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.174.999.975	5.969.714.725	794.714.750
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	5.174.999.975	5.969.714.725	794.714.750
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7.198.885.075	8.909.634.965	1.710.749.890
		Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung	7.198.885.075	8.909.634.965	1.710.749.890
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	17.132.849.720	23.606.904.245	6.474.054.525
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	17.132.849.720	23.606.904.245	6.474.054.525
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.149.999.800	1.272.738.800	122.739.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.149.999.800	1.272.738.800	122.739.000
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	599.999.875	547.722.125	- 52.277.750

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	549.999.925	725.016.675	175.016.750
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	31.774.994.200	32.062.340.000	287.345.800
		Penataan Prasarana Pertanian	31.774.994.200	32.062.340.000	287.345.800
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha	30.022.955.450	29.824.410.975	- 198.544.475
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	474.999.850	699.002.775	224.002.925
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	1.277.038.900	1.538.926.250	261.887.350
		Penyuluhan Pertanian	499.999.500	499.997.850	- 1.650
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	499.999.500	499.997.850	- 1.650
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	499.999.500	499.997.850	- 1.650
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.520.000.000	1.683.019.740	163.019.740
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	600.000.000	653.999.740	53.999.740
		Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan	600.000.000	653.999.740	53.999.740
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah	920.000.000	1.029.020.000	109.020.000
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	920.000.000	1.029.020.000	109.020.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.433.430.191	36.316.052.130	882.621.939
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.228.735.900	1.741.354.425	512.618.525
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	618.669.850	610.909.850	- 7.760.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	362.769.100	820.456.650	457.687.550
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.296.950	309.987.925	62.690.975
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.864.361.345	28.139.746.190	- 724.615.155
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.663.634.720	24.099.999.565	- 563.635.155
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.065.452.000	3.904.472.000	- 160.980.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	135.274.625	135.274.625	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	535.340.000	560.340.000	25.000.000
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada	535.340.000	560.340.000	25.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.896.037	848.601.937	38.705.900
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.449.812	62.449.812	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.377.225	133.533.125	39.155.900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.069.000	652.619.000	- 450.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.567.594	858.148.062	358.580.468
		Pengadaan Mebel	99.959.063	98.971.283	- 987.780
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.958.531	559.530.279	359.571.748

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.650.000	199.646.500	- 3.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.997.219	1.537.510.694	151.513.475
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.758.994	635.758.994	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.328.225	592.841.700	- 4.486.525
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	152.910.000	308.910.000	156.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.844.755.321	2.353.573.972	508.818.651
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	876.606.400	1.185.470.400	308.864.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.895.000	142.895.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.759.865	292.759.865	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	532.494.056	732.448.707	199.954.651
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264.776.775	276.776.850	12.000.075
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	141.999.950	154.000.025	12.000.075
		Sosialisasi Peraturan Perundang-	122.776.825	122.776.825	-
UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN			2.303.841.548	2.352.690.688	48.849.140
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.169.904.300	1.180.405.300	10.501.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.169.904.300	1.180.405.300	10.501.000
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.169.904.300	1.180.405.300	10.501.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.937.248	1.172.285.388	38.348.140
		Administrasi Keuangan	781.200.000	770.000.000	- 11.200.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	781.200.000	770.000.000	- 11.200.000
		Administrasi Umum	125.033.998	117.142.138	- 7.891.860
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.731.173	100.839.313	- 7.891.860
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.302.825	16.302.825	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.500.000	119.940.000	57.440.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.500.000	119.940.000	57.440.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.203.250	165.203.250	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.953.250	136.953.250	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.250.000	28.250.000	-
UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH			1.775.667.843	1.871.287.318	95.619.475
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	874.853.545	890.820.620	15.967.075
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	874.853.545	890.820.620	15.967.075
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	476.698.045	492.695.120	15.997.075
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	398.155.500	398.125.500	- 30.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.814.298	980.466.698	79.652.400
		Administrasi Keuangan	442.800.000	448.800.000	6.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	442.800.000	448.800.000	6.000.000
		Administrasi Umum	233.627.540	221.373.690	- 12.253.850
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.572.165	86.756.415	4.184.250
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.280.375	16.732.275	2.451.900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.775.000	117.885.000	- 18.890.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.181.250	201.087.500	99.906.250
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.181.250	201.087.500	99.906.250
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.500.508	26.500.508	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.508	26.500.508	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.705.000	82.705.000	- 14.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.705.000	82.705.000	- 14.000.000
UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN			2.061.203.460	2.051.503.328	- 9.700.132
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.299.999.691	1.287.709.909	- 12.289.782
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.299.999.691	1.287.709.909	- 12.289.782
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.299.999.691	1.287.709.909	- 12.289.782
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.203.769	763.793.419	2.589.650
		Administrasi Keuangan	603.000.000	593.300.000	- 9.700.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	603.000.000	593.300.000	- 9.700.000
		Administrasi Umum	39.999.869	42.289.519	2.289.650
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.869	42.289.519	2.289.650
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.642.350	17.642.350	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.642.350	17.642.350	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.561.550	110.561.550	10.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.561.550	110.561.550	10.000.000
UPT PEMBIBITAN TERNAK			2.785.228.823	3.055.580.248	270.351.425
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.531.067.255	1.799.499.605	268.432.350
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	1.531.067.255	1.799.499.605	268.432.350
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan	1.531.067.255	1.799.499.605	268.432.350
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.161.568	1.256.080.643	1.919.075
		Administrasi Keuangan	496.800.000	496.550.000	- 250.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	496.800.000	496.550.000	- 250.000
		Administrasi Umum	81.900.499	83.034.874	1.134.375
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.905.524	70.905.524	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.994.975	12.129.350	1.134.375
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.726.000	84.036.000	- 690.000
		Pengadaan Mebel	18.687.500	18.687.500	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.038.500	65.348.500	- 690.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.883.869	164.608.569	1.724.700
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.883.869	164.608.569	1.724.700
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.851.200	427.851.200	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.066.200	100.066.200	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.785.000	92.785.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	235.000.000	-
UPT VETERINER			1.900.274.272	2.337.674.278	437.400.006
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.024.997.850	1.069.935.177	44.937.327
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	674.998.550	720.008.527	45.009.977
		Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas	674.998.550	720.008.527	45.009.977
		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	349.999.300	349.926.650	- 72.650
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	349.999.300	349.926.650	- 72.650
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.276.422	1.267.739.101	392.462.679
		Administrasi Keuangan	279.000.000	256.400.000	- 22.600.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.000.000	256.400.000	- 22.600.000
		Administrasi Umum	255.978.935	256.213.540	234.605
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.978.935	256.213.540	234.605
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.606.250	532.434.324	414.828.074
		Pengadaan Mebel	9.718.750	17.218.750	7.500.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.387.500	206.815.990	107.428.490
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	8.500.000	308.399.584	299.899.584
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.155.987	117.155.987	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.155.987	117.155.987	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.535.250	105.535.250	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.535.250	105.535.250	-

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap pernyataan sasaran strategis, dan disertai dengan formulasi perhitungan, sumber data dan penanggungjawab dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)			
		- Sub Sektor Perkebunan	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB ADHB dari sub sektor Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB ADHB}} \times 100\%$	BPS Sulteng	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
		- Sub Sektor Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB ADHB dari sub sektor Peternakan}}{\text{Jumlah PDRB ADHB}} \times 100\%$	BPS Sulteng	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Bidang Peternakan dan Penyuluhan; UPT Pembibitan Ternak; UPT Veteriner
		Nilai Tukar Petani (NTP)			
		- Sub Sektor Perkebunan	Perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)	BPS Sulteng	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
	- Sub Sektor Peternakan	Perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)	BPS Sulteng	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Bidang Peternakan dan Penyuluhan; UPT Pembibitan Ternak; UPT Veteriner	
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)			Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
		- Kelapa Dalam	$\frac{\text{Produksi Tanaman Kelapa Dalam (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Kelapa Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
		- Cengkeh	$\frac{\text{Produksi Tanaman Cengkeh (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Cengkeh Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
		- Kopi	$\frac{\text{Produksi Tanaman Kopi (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Kopi Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
		- Kakao	$\frac{\text{Produksi Tanaman Kakao (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Kakao Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
		- Pala	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pala (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Pala Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
		- Kelapa Sawit	$\frac{\text{Produksi Tanaman Kelapa Sawit (Kg)}}{\text{Luas Lahan Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan (Ha)}}$	Disbunak Sulteng	
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	Jumlah Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah	Disbunak Sulteng	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Bidang Peternakan dan Penyuluhan; UPT Pembibitan Ternak; UPT Veteriner
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)			
		- Perkebunan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	Disbunak Sulteng	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan
		- Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Peternakan yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	Disbunak Sulteng	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Bidang Peternakan dan Penyuluhan; UPT Pembibitan Ternak; UPT Veteriner

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan komitmen kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	
		- Sub Sektor Perkebunan	8,86
		- Sub Sektor Peternakan	1,90
		Nilai Tukar Petani (NTP)	
		- Sub Sektor Perkebunan	101,41
		- Sub Sektor Peternakan	99,00
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)	
		- Kelapa Dalam	1.211
		- Cengkeh	450
		- Kopi	607
		- Kakao	745
		- Pala	255
		- Kelapa Sawit	2.858
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)	
		- Perkebunan	59,00
		- Peternakan	40,51

Total Pagu APBD Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp121.989.138.315,- dengan rincian pagu per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pagu Belanja (Dirinci Per Program)
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 41.756.417.379,00	APBD-P
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 42.464.284.069,00	APBD-P
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 32.062.340.000,00	APBD-P
4	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 2.752.954.917,00	APBD-P
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 2.453.144.100,00	APBD-P
6	Penyuluhan Pertanian	Rp 499.997.850,00	APBD-P
Total		Rp 121.989.138.315,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Kinerja disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA 2021 – 2026 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah), melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dinilai dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017)

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 secara rata-rata yaitu 95,30%, dimana berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, realisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 masuk dalam kategori sangat tinggi. Sesuai dengan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026, maka perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang diuraikan berdasarkan pernyataan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)					BPS (PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021**)	
		- Sub Sektor Perkebunan	8,86	8,20	92,54	Sangat Tinggi		
		- Sub Sektor Peternakan	1,90	1,46	76,83	Tinggi		
		Nilai Tukar Petani (NTP)						BPS Sulteng
		- Sub Sektor Perkebunan	101,41	103,31	101,87	Sangat Tinggi		
		- Sub Sektor Peternakan	99,00	100,52	101,54	Sangat Tinggi		
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)					Disbunnak Prov. Sulteng (ASEM 2022)	
		- Kelapa Dalam	1.211	1.190	98,27	Sangat Tinggi		
		- Cengkeh	450	414	92,00	Sangat Tinggi		
		- Kopi	607	625,92	103,12	Sangat Tinggi		
		- Kakao	745	699	93,83	Sangat Tinggi		
		- Pala	255	175	68,63	Sedang		
		- Kelapa Sawit	2.858	3.350	117,21	Sangat Tinggi		
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796	458.057	97,71	Sangat Tinggi	Disbunnak Prov. Sulteng (ASEM 2022)	
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)					Disbunnak Prov. Sulteng	
		- Perkebunan	59,00	59,81	101,37	Sangat Tinggi		
		- Peternakan	40,51	38,49	95,01	Sangat Tinggi		
	Rata - Rata Kinerja				95,38	Sangat Tinggi		

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun lalu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021, namun dikarenakan terjadi perubahan indikator kinerja dalam Renstra Renstra 2016 – 2021 dan Renstra 2021 – 2026, sehingga realisasi kinerja 2022 dan realisasi kinerja tahun lalu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Perbandingan realisasi kinerja hanya dapat dilakukan untuk beberapa indikator kinerja yang datanya tersedia, meskipun belum merupakan target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan

Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya data perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan data kinerja 2021 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)						
		- Sub Sektor Perkebunan		8,85		8,86	8,20	92,54
		- Sub Sektor Peternakan		1,89		1,90	1,46	76,83
		Nilai Tukar Petani (NTP)						
		- Sub Sektor Perkebunan	88,83	101,16	113,88	101,41	103,31	101,87
		- Sub Sektor Peternakan	105,00	98,25	93,57	99,00	100,52	101,54
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan						
		- Kelapa Dalam		1.195		1211	1.190	98,27
		- Cengkeh		398		450	414	92,00
		- Kopi		643,6		607	625,92	103,12
		- Kakao		708		745	699	93,83
		- Pala		220		255	175	68,63
		- Kelapa Sawit		3.204		2858	3.350	117,21
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	424.630	434.070	102,22	468.796	458.057	97,71
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)						
		- Perkebunan		53,68		59,00	59,81	101,37
		- Peternakan		34,45		40,51	38,49	95,01
	Rata - Rata Kinerja							95,38

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja pada tahun 2026, dimana tahun 2026 merupakan akhir dari periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah atau merupakan akhir dari target jangka menengah. Apabila dilihat secara rata – rata kinerja capaian kinerja target jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 82,83% pada tahun 2022. Namun apabila dilihat capaian kinerja untuk setiap indikator, terdapat beberapa indikator yang telah

melebihi target akhir RPJMD, yaitu NTP Sub Sektor Perkebunan, Produktivitas Kopi, dan Kelapa Sawit. Untuk lebih jelasnya data perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)			
		- Sub Sektor Perkebunan	8,20	8,91	92,02
		- Sub Sektor Peternakan	1,46	1,94	75,25
		Nilai Tukar Petani (NTP)			
		- Sub Sektor Perkebunan	103,31	102,41	100,88
		- Sub Sektor Peternakan	100,52	102,00	98,55
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)			
		- Kelapa Dalam	1.190	1.307	91,05
		- Cengkeh	414	659	62,82
		- Kopi	625,92	616	101,61
		- Kakao	699	1.000	69,90
		- Pala	175	255	68,63
		- Kelapa Sawit	3.350	2.863	117,01
		3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	458.057
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)			
		- Perkebunan	59,81	83,95	71,24
		- Peternakan	38,49	67,55	56,98
	Rata - Rata Kinerja				82,90

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026, terdapat 4 (empat) komponen sasaran strategis yang diukur sebagai indikator kinerja, yaitu: Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak, Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, Meningkatnya

Populasi Ternak, dan Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Petani Perkebunan dan Peternak.

Adapun analisis kinerja untuk masing – masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, diantaranya yaitu Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB (ADHB), dan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun berjalan (2022) yang dibandingkan dengan tahun dasar (2018). NTP juga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan, juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

a. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku, dimana PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah yang bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Adapun capaian kinerja PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp20.250.960 (PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021**) atau mencapai 92,54%.

Pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 18,87 persen. Golongan tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 43,42 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. (BPS, 2021). Sedangkan capaian kinerja PDRB Sub Sektor Peternakan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.605.422 (PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021**) atau mencapai 76,83%. Beberapa subkategori dan golongan pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2021 berada pada golongan Perkebunan yaitu sebesar 8,59 persen, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh golongan Peternakan sebesar 6,83 persen. (BPS, 2021).

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Sulawesi Tengah telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Trend yang ditunjukkan oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menunjukkan penurunan selama periode 2017- 2021 yaitu dari 28,98 persen pada tahun 2017 menjadi 18,87 persen pada tahun 2021. Sumbangan terbesar pada tahun 2021 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan (33,83 persen) kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (18,87 persen).

b. NTP Sub Sektor Perkebunan dan NTP Sub Sektor Peternakan

NTP Subsektor Perkebunan secara rata - rata sepanjang tahun 2022 yaitu 103,31 yang menunjukkan bahwa secara rata - rata NTP Subsektor Perkebunan mengalami peningkatan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian NTP Subsektor Perkebunan pada tahun 2022 yaitu 100,88%. Hal ini disebabkan oleh perubahan indeks harga yang diterima petani (It) yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sepanjang tahun 2022.

NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Semakin tinggi NTP maka secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani. Sehingga dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun 2022 kemampuan atau daya beli petani pada sub sektor perkebunan adalah sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh indeks harga yang diterima petani subsektor perkebunan sepanjang tahun 2022 secara rata - rata tercatat sebesar 117,61 sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya tercatat sebesar 113,84.

NTP Subsektor Peternakan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Capaian NTP Subsektor Peternakan pada tahun 2022 yaitu 98,55% atau secara rata - rata NTP Subsektor Peternakan sepanjang tahun 2022 yaitu 100,52. Hal tersebut disebabkan oleh Indeks harga yang diterima petani subsektor peternakan sepanjang tahun 2022 secara rata - rata tercatat sebesar 113,40 sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya tercatat sebesar 112,81.

2) Meningkatnya Produktifitas Komoditas Unggulan Perkebunan

Capaian produktifitas komoditas unggulan perkebunan dapat dikatakan sangat baik pada tahun 2022. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian 6 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagian besar telah masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu kelapa dalam, cengkeh, kopi, kakao, dan kelapa sawit. Sedangkan satu - satunya komoditi yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori sedang yaitu komoditi pala. Capaian produktifitas komoditas unggulan perkebunan secara umum disebabkan oleh penambahan luas tanaman menghasilkan yang cukup signifikan pada komoditi perkebunan tersebut, sehingga terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan di daerah - daerah sentra komoditi perkebunan tersebut, selain itu

peningkatan harga komoditi juga menyebabkan minat dan semangat masyarakat untuk merawat tanamannya juga meningkat. Terdapat 2 komoditi unggulan perkebunan yang berhasil melebihi target kinerja produktivitas komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2022 yaitu komoditi kopi dan kelapa sawit. Realisasi produktivitas kopi pada tahun 2022 mencapai 625,92 kg/ha (103,12%) dari target yang ditetapkan sebesar 607 kg/ha, dan realisasi produktivitas kelapa sawit mencapai 3.350 kg/ha (117,21%) dari target pada tahun 2022 sebesar 2.858 kg/ha.

Capaian produktivitas kelapa dalam pada tahun 2022 yaitu 98,27% dari target kinerja, dimana terjadi sedikit penurunan produktivitas apabila dibandingkan dengan produktivitas kelapa dalam pada tahun 2021 berdasarkan data Angka Tetap Perkebunan Sulawesi Tengah Tahun 2021 (ATAP Perkebunan 2021). Namun apabila dilihat dari capaian produksi pada tahun 2022 berdasarkan Angka Sementara Perkebunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 (ASEM Perkebunan 2022) telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan produksi di kabupaten yang menjadi sentra kelapa dalam, seperti Kabupaten Donggala, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Toli – Toli, Parigi Moutong dan Tojo Una – Una. Peningkatan produksi kelapa dalam diantaranya dipengaruhi oleh penambahan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) yang cukup banyak yaitu 3.869 ha. Adanya bantuan peremajaan dan perluasan areal tanaman kelapa baik dari yang bersumber dari APBD I, APBD II, APBN, Dana Desa maupun swadaya masyarakat. Kemudian selain faktor teknis tersebut, kenaikan harga komoditi kelapa dalam juga menyebabkan tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi kelapanya, sehingga sangat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman kelapa. Namun dikarenakan penambahan luas TM yang cukup banyak, sehingga pembagi dalam

perhitungan produktivitas juga makin besar, sehingga capaian produktivitas belum mencapai target kinerja 2022.

Produktivitas cengkeh pada tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2021, meskipun capaian produktivitas cengkeh tahun 2022 hanya mencapai 92% dari target kinerja. Namun apabila dilihat dari capaian produksi, telah terjadi peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, yang diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan produksi di kabupaten yang menjadi sentra cengkeh, seperti Kabupaten Toli – Toli, Donggala, Poso, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Una – Una dan Parigi Moutong. Peningkatan produksi cengkeh diantaranya dipengaruhi oleh penambahan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) yang cukup banyak yaitu 1.706,3 ha. Adanya bantuan Peremajaan tanaman cengkeh baik yang bersumber dari APBD I, APBD II, APBN, Dana Desa maupun swadaya masyarakat. Selain faktor teknis tersebut, kenaikan harga komoditi cengkeh juga menyebabkan tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi cengkehnya, sehingga sangat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman cengkeh.

Produktivitas kopi mencapai 103,12% dari target kinerja pada tahun 2022, namun terjadi sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan capaian produktivitas pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi peningkatan produksi kopi pada tahun 2022 dibandingkan produksi tahun 2021, hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan produksi di kabupaten yang menjadi sentra kopi, seperti Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Toli – Toli. Penambahan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) yang cukup banyak yaitu 122 ha. Bantuan peremajaan dan perluasan areal tanaman kopi baik yang bersumber dari APBD I, APBD II, APBN, Dana Desa maupun swadaya masyarakat. Selain faktor teknis tersebut, kenaikan harga komoditi kopi dan meningkatnya bisnis perkopian di Sulawesi Tengah juga menyebabkan tingginya minat

masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi kopinya, sehingga sangat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman kopi.

Capaian produktivitas kakao pada tahun 2022 yaitu 93,83% dari target kinerja, dan mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan capaian produktivitas tahun 2021. Kondisi tanaman kakao yang didominasi oleh tanaman tua dan rusak, serta tingginya serangan hama dan penyakit, sulitnya mengakses pupuk dan pestisida menyebabkan banyak petani yang tidak merawat tanamannya dan melakukan alih fungsi lahan ke komoditi lainnya. Selain itu harga kakao yang tidak menentu, dan dana untuk pengembangan kakao (peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, dan pengendalian hama dan penyakit) yang sangat terbatas juga sangat mempengaruhi penurunan produksi kakao pada tahun 2022 berdasarkan ASEM Perkebunan 2022. Perlu diketahui bahwa dalam perhitungan produksi pada ASEM Perkebunan 2022 belum menghitung produksi kakao pada bulan Oktober – Desember 2022, dimana pada bulan tersebut merupakan bulan panen kakao yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah produksi kakao pada ATAP Perkebunan 2022 nanti.

Pala merupakan satu – satunya komoditi yang capaian produktivitasnya masuk dalam kategori sedang pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 68,63% atau mencapai produktivitas 175 kg/ha dari target produktivitas 255 kg/ha. Meskipun secara capaian produksi komoditi pala mengalami peningkatan sebanyak 14,2 ton dibandingkan tahun sebelumnya (ASEM Perkebunan 2022) menjadi 953,15 ton, namun kenaikan produksi tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan penambahan luas areal tanaman menghasilkan yang cukup besar, yaitu 1.172,5 ha, sehingga pembagi dalam perhitungan produktivitas menjadi cukup besar yang sangat mempengaruhi nilai produktivitas pala pada tahun 2022. Diharapkan produksi pala akan mengalami peningkatan pada tahun

berikutnya melalui bantuan pengembangan komoditi pala baik bersumber dari dana APBN dan APBD setiap tahunnya.

Peningkatan produktifitas kelapa sawit diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan produksi di kabupaten yang menjadi sentra produksi kelapa sawit, yaitu Kabupaten Donggala, Morowali, Morowali Utara, Banggai dan Buol karena adanya perawatan dan pemupukan yang berkelanjutan, utamanya pada perusahaan besar swasta. Selain itu, kenaikan harga komoditi kelapa sawit juga menyebabkan tingginya minat masyarakat dalam melakukan pengembangan komoditi kelapa sawit, sehingga dengan adanya bantuan perluasan areal kelapa sawit di perkebunan rakyat yang bersumber dari dana APBD II maupun swadaya petani juga memberi kontribusi yang cukup besar pada peningkatan produksi kelapa sawit.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan dan masih akan terus dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan yaitu melalui peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan. Upaya yang paling baik dilakukan untuk saat ini yaitu melalui intensifikasi, sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan intensifikasi harus lebih ditingkatkan, mengingat potensi tanaman menghasilkan yang sangat banyak, namun pemupukan belum memadai karena keterbatasan petani dalam mengakses dan membeli pupuk. Selain itu yang masih harus mendapat perhatian lebih adalah dana untuk pengendalian hama dan penyakit, khususnya pada tanaman kakao, kelapa dan cengkeh. Untuk alternatif solusi pada jangka panjang yaitu melalui peremajaan dan rehabilitasi pada tanaman tua, dan melakukan perluasan areal tanaman perkebunan.

3) Meningkatnya Populasi Peternakan

Populasi ternak sapi menjadi indikator kinerja utama dalam pengukuran pencapaian sasaran strategis meningkatnya populasi ternak. Pada tahun 2022, jumlah

populasi ternak sapi adalah sebanyak 458.057 ekor atau 97,71% dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 468.796 ekor. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian populasi ternak tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target populasi peternakan pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh tingginya persentase pemotongan sapi betina produktif, dan terjadinya peningkatan pengeluaran ternak sapi ke luar Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun sebelumnya.

Upaya percepatan peningkatan jumlah ternak sapi dalam rangka pencapaian target jangka menengah masih sangat perlu dilakukan melalui pengoptimalan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) yang juga didukung oleh Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dimana sekarang telah berganti nama menjadi Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri), pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dan pengawasan pengeluaran dan pemasukan ternak. Selain itu pemanfaatan potensi padang penggembalaan ternak dan pengalihan sistem pemeliharaan ternak dari tradisional ke semi intensif dan insentif merupakan alternatif solusi lain yang telah dilakukan dalam mendukung upaya peningkatan populasi ternak.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran sangat dipengaruhi dari penerapan strategi dan kebijakan serta ketepatan identifikasi *output/outcome* yang selanjutnya akan menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 ini terdapat beberapa Program dan Kegiatan dengan Indikator Kinerja yang dianggap dapat berkontribusi secara langsung (berdampak signifikan) terhadap Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya maka Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dibagi berdasarkan Sub Sektor Perkebunan dan Sub Sektor Peternakan.

1. Sub Sektor Perkebunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sub Sektor Perkebunan adalah Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB ADHB; NTP Sub Sektor Perkebunan; Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan; dan Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan. Secara umum realisasi indikator program dan kegiatan telah melebihi target yang ditetapkan, kecuali untuk indikator Produksi Cengkeh dan Kakao (tingkat capaian masing – masing 95,80% dan 90,39%); Investasi Perusahaan Perkebunan (tingkat capaian 33,33%); Persentase Tingkat Serangan OPT Perkebunan (tingkat capaian secara rata – rata 84,87%) dan Luas Areal Pengendalian OPT Perkebunan (tingkat capaian 37,50%), sehingga pencapaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan belum mencapai target kinerja pada tahun 2022, meskipun secara umum produktivitas komoditas unggulan perkebunan telah masuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk melihat lebih detail Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (ton) - Kelapa Dalam - Cengkeh - Kopi - Kakao - Pala - Kelapa Sawit	199.976	200.812	- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	- Luas Areal Intensifikasi, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha)	1.823	2.458
			22.995	22.030			100	100
2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Investasi Perusahaan Perkebunan (Unit Usaha) Persentase Tingkat Serangan OPT Perkebunan (Persen) Kakao Kelapa Cengkeh Kopi	3	1	Pengendalian dan Penanggulangan an Bencana Pertanian Provinsi	- Rekomendasi Teknis PBS (Dokumen) - Luas Areal Pengendalian OPT Perkebunan (Ha)	3	4
			44,00	54,99			1.600	600
			49,00	30,40				
			19,41	43,05				
			17,40	32,71				
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan (Persen) Kemitraan Usaha Produk Hasil Perkebunan (Dokumen)	9,90	19,10	Penataan Prasarana Pertanian	- Panjang Peningkatan Jalan Kantong Produksi (Km) - Peningkatan Prasarana Pengairan Perkebunan (Unit) - Kelompok Usaha yang Memenuhi Standar Mutu Hasil Perkebunan (Kelompok)	35	75,15
			2	2			5	2
							3	8
4	Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani Perkebunan yang Menerapkan Teknologi (Kelompok)	80	80	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani yang Dilatih (Kelompok)	80	80

2. Sub Sektor Peternakan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sub Sektor Peternakan adalah Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB ADHB; NTP Sub Sektor Peternakan; Populasi Ternak Sapi; dan Cakupan Bina Kelompok Tani Peternakan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Program, dan Kegiatan Sub Sektor Peternakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kelahiran Ternak Sapi (Ekor)	37.000	14.307	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Akseptor Ternak Sapi (Ekor)	38.000	23.024
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kemitraan Usaha Produk Hasil Peternakan (Dokumen)	3	3	Penataan Prasarana Pertanian	Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Unit Usaha)	3	8
4	Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani Peternakan yang Menerapkan Teknologi (Kelompok)	40	80	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani yang Dilatih (Kelompok)	80	80
5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)	86	97,05	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prevalensi Penyakit Hewan Menular (Persen)	3,00	2,95

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelahiran Ternak Sapi dan Akseptor Ternak Sapi merupakan indikator yang realisasinya tidak mencapai target

yang ditetapkan pada tahun 2022, dimana tingkat capaian dari indikator ini masing-masing adalah 38,67% dan 60,59%. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran operasional untuk pencatatan kelahiran dan akseptor sehingga petugas tidak melakukan identifikasi dan menginputnya pada aplikasi Isiknas yang tentu saja dapat mempengaruhi data jumlah populasi ternak pada tahun 2022. Namun apabila dilihat dari capaian sasaran Meningkatnya Populasi Ternak telah masuk dalam kategori sangat tinggi (97,71%).

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Analisis atas efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dihitung berdasarkan pengukuran efisiensi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

PMK No.214/PMK.02/2017 menyatakan bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Dimana ketika nilai efisiensi lebih dari 20% maka dapat diartikan bahwa nilai efisiensi telah mencapai angka maksimal efisiensi, yang berarti bahwa selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran dengan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran sudah efisien.

Analisis efisiensi dapat dilakukan pada tiap pernyataan sasaran strategis apabila terdapat data alokasi anggaran pada tiap sasaran strategis. Namun khusus untuk sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 – 2026 tidak dapat dilakukan pemisahan secara jelas terhadap setiap pernyataan sasaran strategis, dikarenakan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bersifat makro, yang berarti bahwa banyak faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan petani yang melibatkan banyak sektor di luar sektor perkebunan dan peternakan, sehingga untuk sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak tidak dapat dilakukan penentuan alokasi anggaran secara spesifik, karena seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun dan peternak. Hal yang sama juga berlaku untuk sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak, dikarenakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah berbasis kelompok.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran hanya dapat dilakukan pada 2 pernyataan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan dan Meningkatnya Populasi Ternak karena dapat dilakukan

pemisahan alokasi anggaran secara jelas. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)							
		- Sub Sektor Perkebunan	8,86	8,20	92,54				
		- Sub Sektor Peternakan	1,90	1,46	76,83				
		Nilai Tukar Petani (NTP)							
		- Sub Sektor Perkebunan	101,41	103,31	101,87				
		- Sub Sektor Peternakan	99,00	100,52	101,54				
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan				Rp50.970.827.368	Rp 49.209.214.916	96,54%	-1,08%
		- Kelapa Dalam	1.211	1.190	98,27%				
		- Cengkeh	450	414	92,00%				
		- Kopi	607	625,92	103,12%				
		- Kakao	745	699	93,83%				
		- Pala	255	175	68,63%				
		- Kelapa Sawit	2.858	3.350	117,21%				
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796	458.057	97,71%	Rp29.261.893.568	Rp 28.570.265.182	97,64%	0,07%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)							
		- Perkebunan	59,00	59,81	101,37				
		- Peternakan	40,51	38,49	95,01				
	Efisiensi								-0,50%

Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai angka -0,50% secara keseluruhan. Namun apabila dilihat berdasarkan tingkat efisiensi pada tiap sasaran strategis, sasaran Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan mendapatkan nilai -1,08% yang berarti bahwa terjadi inefisiensi. Meskipun untuk penilaian efisiensi pada komoditi perkebunan memang agak sulit dilakukan pada tahun berjalan dikarenakan bantuan yang diberikan pada komoditi perkebunan belum dapat langsung memberikan kontribusi nyata pada tahun berkenan.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran Meningkatnya Populasi Ternak pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,07%, yang berarti bahwa selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran dengan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran sudah efisien.

Selanjutnya apabila dilihat realisasi anggaran yang bersumber dari dana APBD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dari total pagu Belanja sebesar Rp121.989.138.315,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp115.383.416.467 (94,58%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5
	TOTAL APBD	121.989.138.315	115.383.416.467	94,58
I	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	110.320.402.455	104.155.983.967	94,41
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.486.253.935	37.296.870.230	96,91
	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.969.714.725	5.437.552.915	91,09
	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	5.969.714.725	5.437.552.915	91,09
	2. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	8.909.634.965	8.605.165.092	96,58
	1. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	8.909.634.965	8.605.165.092	96,58
	3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	23.606.904.245	23.254.152.223	98,51
	1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	23.606.904.245	23.254.152.223	98,51
2.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.272.738.800	1.243.818.671	97,73
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.272.738.800	1.243.818.671	97,73
	1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,	547.722.125	530.379.676	96,83
	2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	725.016.675	713.438.995	98,40
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.062.340.000	31.288.606.317	97,59
	1. Penataan Prasarana Pertanian	32.062.340.000	31.288.606.317	97,59
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	29.824.410.975	29.462.866.562	98,79

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		% Capaian
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	699.002.775	674.255.475	96,46
	3. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.538.926.250	1.151.484.280	74,82
4.	Penyuluhan Pertanian	499.997.850	402.751.796	80,55
	1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	499.997.850	402.751.796	80,55
	1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	499.997.850	402.751.796	80,55
5.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.683.019.740	1.665.120.104	98,94
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	653.999.740	644.273.004	98,51
	1. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	653.999.740	644.273.004	98,51
	2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.029.020.000	1.020.847.100	99,21
	1. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1.029.020.000	1.020.847.100	99,21
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.316.052.130	32.258.816.849	88,83
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.741.354.425	1.361.997.634	78,21
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	610.909.850	565.994.920	92,65
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	820.456.650	512.359.008	62,45
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.987.925	283.643.706	91,50
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.139.746.190	25.097.523.219	89,19
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.099.999.565	21.188.450.094	87,92
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.904.472.000	3.803.310.000	97,41
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	135.274.625	105.763.125	78,18
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	560.340.000	325.447.600	58,08
	1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	560.340.000	325.447.600	58,08
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	848.601.937	806.372.158	95,02
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.449.812	61.821.450	98,99
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.533.125	98.072.825	73,44
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.619.000	646.477.883	99,06
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	858.148.062	837.391.481	97,58
	1. Pengadaan Mebel	98.971.283	97.467.018	98,48
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.530.279	540.680.380	96,63
	3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.646.500	199.244.083	99,80
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.537.510.694	1.491.162.547	96,99
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.758.994	592.297.461	93,16
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.841.700	591.365.367	99,75
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.910.000	307.499.719	99,54

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.573.972	2.116.529.660	89,93
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.185.470.400	960.785.451	81,05
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.895.000	139.874.000	97,89
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.759.865	292.584.150	99,94
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	732.448.707	723.286.059	98,75
	8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.776.850	222.392.550	80,35
	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	154.000.025	139.295.725	90,45
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122.776.825	83.096.825	67,68
	II UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	2.352.690.688	2.333.475.242	99,18
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.180.405.300	1.163.767.580	98,59
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.180.405.300	1.163.767.580	98,59
	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	1.180.405.300	1.163.767.580	98,59
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.172.285.388	1.169.707.662	99,78
	1. Administrasi Keuangan	770.000.000	768.750.000	99,84
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	770.000.000	768.750.000	99,84
	2. Administrasi Umum	117.142.138	116.050.062	99,07
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.839.313	99.747.262	98,92
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.302.825	16.302.800	100,00
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.940.000	119.880.000	99,95
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.940.000	119.880.000	99,95
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.203.250	165.027.600	99,89
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.953.250	136.777.600	99,87
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.250.000	28.250.000	100,00
	II UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH	1.871.287.318	1.782.499.592	95,26
	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	890.820.620	836.060.721	93,85
	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	890.820.620	836.060.721	93,85
	1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	492.695.120	463.117.749	94,00
	2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	398.125.500	372.942.972	93,67
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.466.698	946.438.871	96,53
	1. Administrasi Keuangan	448.800.000	448.800.000	100,00
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	448.800.000	448.800.000	100,00
	2. Administrasi Umum	221.373.690	208.474.614	94,17
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.756.415	83.412.649	96,15
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.732.275	15.803.375	94,45
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.885.000	109.258.590	92,68

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		% Capaian
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.087.500	189.507.419	94,24
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.087.500	189.507.419	94,24
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.500.508	22.049.948	83,21
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.508	22.049.948	83,21
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.705.000	77.606.890	93,84
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.705.000	77.606.890	93,84
III	UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN	2.051.503.328	1.828.566.788	89,13
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.287.709.909	1.085.085.125	84,26
	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.287.709.909	1.085.085.125	84,26
	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.287.709.909	1.085.085.125	84,26
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.793.419	743.481.663	97,34
	1. Administrasi Keuangan	593.300.000	579.800.000	97,72
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	593.300.000	579.800.000	97,72
	2. Administrasi Umum	42.289.519	41.211.923	97,45
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.289.519	41.211.923	97,45
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.642.350	17.343.840	98,31
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.642.350	17.343.840	98,31
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.561.550	105.125.900	95,08
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.561.550	105.125.900	95,08
III	UPT PEMBIBITAN TERNAK	3.055.580.248	2.978.211.734	97,47
1.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.799.499.605	1.751.266.657	97,32
	1. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.799.499.605	1.751.266.657	97,32
	1. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	1.799.499.605	1.751.266.657	97,32
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.256.080.643	1.226.945.077	97,68
	1. Administrasi Keuangan	496.550.000	496.550.000	100,00
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	496.550.000	496.550.000	100,00
	2. Administrasi Umum	83.034.874	72.419.741	87,22
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.905.524	62.904.985	88,72
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.129.350	9.514.756	78,44
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.036.000	80.024.000	95,23
	1. Pengadaan Mebel	18.687.500	15.000.000	80,27
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.348.500	65.024.000	99,50

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		% Capaian
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.608.569	157.540.136	95,71
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.608.569	157.540.136	95,71
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.851.200	420.411.200	98,26
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.066.200	92.857.200	92,80
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.785.000	92.785.000	100,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	234.769.000	99,90
	UPT VETERINER	2.337.674.278	2.304.679.144	98,59
1.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.069.935.177	1.046.132.897	97,78
	1. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	720.008.527	712.372.700	98,94
	1. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	720.008.527	712.372.700	98,94
	2. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	349.926.650	333.760.197	95,38
	1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	349.926.650	333.760.197	95,38
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.267.739.101	1.258.546.247	99,27
	1. Administrasi Keuangan	256.400.000	256.400.000	100,00
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.400.000	256.400.000	100,00
	2. Administrasi Umum	256.213.540	247.228.053	96,49
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.213.540	247.228.053	96,49
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	532.434.324	532.231.127	99,96
	1. Pengadaan Mebel	17.218.750	17.200.068	99,89
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.815.990	206.686.500	99,94
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	308.399.584	308.344.559	99,98
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.155.987	117.152.168	100,00
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.155.987	117.152.168	100,00
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.535.250	105.534.899	100,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.535.250	105.534.899	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilaporkan bahwa total sisa anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp6.605.721.848 (5,42%) yang terdiri dari akumulasi sisa pembayaran gaji, tuan rumah kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dialihkan ke Kabupaten Parigi Moutong, dan akumulasi sisa kontrak dari seluruh kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan predikat kinerja yang dinilai dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah mencapai nilai rata-rata 95,38% atau masuk dalam kategori sangat tinggi yang menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja sudah cukup baik dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, dengan rincian pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Kinerja peningkatan kesejahteraan pekebun dan peternak mencapai nilai rata-rata 93,20%.
2. Kinerja peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan mencapai nilai rata - rata 95,51%.
3. Kinerja peningkatan populasi ternak sapi mencapai 97,71%.
4. Kinerja peningkatan pemberdayaan kelompok pekebun dan peternak mencapai nilai rata - rata 98,19%.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun apabila dilihat dari pencapaian setiap sasaran kinerja sudah di

atas 93% yang menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Diharapkan kedepannya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung pencapaian visi misi Gubernur Sulawesi Tengah 2021 – 2026 khususnya untuk urusan pertanian pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Maya Malania Noor, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rusdy Mastura
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

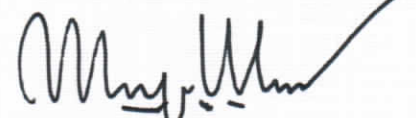
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Ir. MAYA MALANIA NOOR, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19640313 199203 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun dan Peternak	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	
		- Sub Sektor Perkebunan	8,86
		- Sub Sektor Peternakan	1,90
		Nilai Tukar Petani (NTP)	
		- Sub Sektor Perkebunan	101,41
		- Sub Sektor Peternakan	99,00
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)	
		- Kelapa Dalam	1.211
		- Cengkeh	450
		- Kopi	607
		- Kakao	745
		- Pala	255
		- Kelapa Sawit	2.858
3	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	468.796
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun dan Peternak	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)	
		- Perkebunan	59,00
		- Peternakan	40,51

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 33.212.655.261,00	APBD
2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 31.774.994.200,00	APBD
3 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 2.544.997.850,00	APBD
4 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 2.319.904.100,00	APBD
5 Penyuluhan Pertanian	Rp 499.999.500,00	APBD
Total	Rp 70.352.550.911,00	

Palu, **25** Februari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

Ir. MAYA MALANIA NOOR, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19640313 199203 2 004